

KONTRADIKSI OPERATION SOVEREIGN BORDERS AUSTRALIA TERHADAP PERATIFIKASIAN KONVENSI PENGUNGSI TAHUN 1951

Rheeno Hamdani Hudan
Surabaya
Ilmu Hubungan Internasional
rheenohamdanihudan@gmail.com

ABSTRAK

*Australia merupakan salah satu dari 144 negara yang meratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi Tahun 1951. Tetapi, Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia menjanjikan upaya untuk menghentikan perahu dalam kampanye nya pada tahun 2013 untuk mengurangi jumlah pencari suaka yang berusaha masuk ke Australia. Pasca Tony Abbot terpilih sebagai Perdana Menteri Australia, dibentuklah Operation Sovereign Border (OSB) yang merupakan operasi keamanan perbatasan yang dipimpin oleh militer dan ditujukan untuk menghentikan arus pencari suaka yang menggunakan perahu ke Australia, operasi ini efektif diterapkan pada 18 September 2013. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar mengenai latar belakang Australia membentuk kebijakan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi Tahun 1951. Hal ini juga tidak lepas dari fakta bahwa Australia merupakan negara yang tidak hanya menandatangani Konvensi Terkait Status Pengungsi Tahun 1951, tetapi juga meratifikasi Konvensi tersebut pada 1954. Dengan menggunakan pendekatan **sekuritisasi**, peneliti melihat bahwa Australia menciptakan wacana dan citra buruk terkait pengungsi dan pencari suaka, dan ini dilakukan dengan argumen keamanan nasional.*

Kata Kunci: *Australia, Imigrasi, Pencari Suaka, Operation Sovereign Borders, Sekuritisasi*

Australia is one of 144 countries that ratified the Convention on the Status of Refugees in 1951. However, Tony Abbott as the Prime Minister of Australia promised efforts to stop the boat in his campaign in 2013 to reduce the number of asylum seekers seeking to enter Australia. After Tony Abbot was elected as Prime Minister of Australia, Operation Sovereign Border (OSB) was formed, which is a border security operation led by the military and aimed at stopping the flow of asylum seekers using boats to Australia, this operation was effectively implemented on September 18, 2013. raises big questions about Australia's background in establishing policies that conflict with its obligations as one of the countries that ratified the Convention on the Status of Refugees in 1951. This is also inseparable from the fact that Australia not only signed the Convention on the Status of Refugees in 1951 but also ratified the Convention in 1954. Using a securitization approach, researchers see that Australia creates bad discourses and images regarding refugees and asylum seekers, and this is done with national security arguments.

Keywords: *Australia, Immigration, Asylum Seekers, Operation Sovereign Borders, Securitization*

Australia merupakan salah satu dari 144 negara yang meratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi Tahun 1951. Tetapi, Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia menjanjikan upaya untuk “menghentikan perahu” dalam kampanyenya pada tahun 2013 untuk mengurangi jumlah pencari suaka yang berusaha masuk ke Australia. Pasca Tony Abbot terpilih sebagai Perdana Menteri Australia, dibentuklah Operation Sovereign Border (OSB) yang merupakan operasi keamanan perbatasan yang dipimpin oleh militer dan ditujukan untuk menghentikan arus pencari suaka yang menggunakan perahu ke Australia, operasi ini efektif diterapkan pada 18 September 2013.

Konvensi Terkait Pengungsi 1951

Konvensi Terkait Status Pengungsi tahun 1951 merupakan satu-satunya dokumen legal yang menjelaskan mengenai pengungsi dan menjelaskan hak pengungsi serta kewajiban bagi negara yang meratifikasinya. Pada awalnya Konvensi Terkait Status Pengungsi tahun 1951 memiliki cakupan yang terbatas hanya pada korban pelarian Perang Dunia II yang terjadi sebelum 1 Januari 1951. Konvensi tersebut kemudian dijadikan subjek dari satu-satunya amandemen terkait status pengungsi, yaitu Protokol Terkait Status Pengungsi tahun 1967. Dalam protokol tersebut batasan geografis dan temporer yang ada dihapus sehingga Konvensi Terkait Status Pengungsi tahun 1951 memiliki cakupan yang universal. Konvensi Terkait Status Pengungsi tahun 1951 juga menjelaskan mengenai kategori status pengungsi yang berhak mendapat bantuan dari negara yang menandatangani konvensi tersebut. Sedangkan pengungsi yang tidak termasuk ke dalam kategori tersebut tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 (Wilson, 2014).

Pengungsi yang termasuk dalam kategori yang dijelaskan dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 memiliki hak untuk tidak dikembalikan ke negara asalnya oleh negara tujuan pengungsi tersebut, hal ini dijelaskan dalam prinsip utama Konvensi Terkait Status Pengungsi tahun 1951 yaitu *non-refoulement* (Wilson, 2014). Beberapa hak lain yang didapat oleh pengungsi yang termasuk dalam kategori Konvensi 1951 adalah hak untuk tidak diusir kecuali dalam kondisi tertentu yang dapat dijelaskan, hak untuk tidak dihukum karena memasuki negara peratifikasi secara ilegal, hak untuk mengakses pengadilan, hak untuk kebebasan bergerak di dalam teritori dan hak untuk diberikan dokumen identitas.

Sejarah dan Dinamika Imigrasi Pencari Suaka di Australia

Secara historis, Australia merupakan salah satu negara yang memiliki nilai strategis diantara negara-negara lain di kawasan Asia dan Pasifik. Dikatakan bernilai strategis karena status Australia sebagai negara maju yang relatif damai dan memiliki pembangunan ekonomi yang tinggi. Di saat yang sama, Australia dikelilingi oleh negara-negara berkembang dengan stabilitas ekonomi yang tidak sebanding dengan Australia. Posisi inilah yang kemudian menjadikan Australia sering menjadi tujuan para pencari suaka dan pengungsi yang mengharapkan perbaikan taraf hidup di Australia. Ribuan pengungsi telah mencari suaka di Australia selama beberapa dekade terakhir, dan didorong oleh faktor seperti perang, kerusuhan sipil dan penganiayaan yang terjadi di negara asal pencari suaka tersebut. Dari tahun 1945 hingga awal 1990-an, tercatat lebih dari setengah juta pengungsi dan orang-orang terlantar lainnya diterima di Australia (Birrell, 2016).

White Australian Policy sendiri merupakan Undang-undang Pembatasan Keimigrasian tahun 1901, yang disusun oleh Perdana Menteri kedua Australia, Alfred Deakin. Kebijakan-kebijakan ini secara efektif memberi keuntungan kepada para imigran yang berasal dari Inggris, dan sekaligus menolak imigran yang berasal dari Asia dan Kepulauan Pasifik. Meski kemudian

dihapus pada tahun 1973, namun kebijakan ini dalam perkembangannya memberikan dampak yang signifikan terhadap bagaimana Australia memandang pencari suaka, terutama pencari suaka ilegal yang berasal dari negara-negara berkembang dan non-Eropa (Birrell, 2016).

Catatan pencari suaka pertama yang tiba di Australia melalui perahu yang tidak sah terjadi pada bulan April 1976. Melarikan diri dari Vietnam Selatan setelah kemenangan Partai Komunis tahun 1974, dan diperkirakan 2.000 pencari suaka dari Vietnam berusaha masuk ke Australia dari 1976–1982. Kedatangan sporadis dari pencari suaka ilegal menggunakan ini menjadi salah satu penyebab keprihatinan bagi orang-orang Australia. Selain itu, masalah ketenagakerjaan dan keamanan juga meningkat dengan Waterside Worker Federation kemudian menyerukan pemogokan atas masalah itu. Ini kemudian tercatat sebagai kasus penahanan pertama dari pencari suaka ilegal di Australia. Sebagai tanggapan, pemerintah Malcolm Fraser menaruh lebih dari 50.000 warga Vietnam di kamp-kamp pengungsi di pulau – pulau di sekitar Samudera Hindia (Jupp, 2007).

Selama awal 1990-an, pencari suaka dari Kamboja mulai berdatangan di Australia. Sebagai tanggapan, pemerintahan Australia dibawah Paul Keating menerapkan kebijakan penahanan wajib yang ditujukan untuk menghalangi para pengungsi. Di bawah penahanan wajib, siapa pun yang memasuki zona migrasi Australia tanpa visa ditempatkan di fasilitas penampungan sementara pemeriksaan keamanan dan pemeriksaan kesehatan dilakukan. Selain itu, validitas klaim seseorang atas suaka dinilai oleh Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan (Jupp, 2007).

Pada tahun 1990, sejumlah pencari suaka tiba dari Somalia tanpa dokumentasi. Mereka ditahan di Pusat Penahanan Imigrasi Villawood selama 18 bulan tanpa kemajuan status. Beberapa mulai mogok makan sebagai tanggapan atas penahanan berkepanjangan. Akhirnya, semua bertekad untuk menjadi pengungsi sejati. Pada pertengahan 1990-an, sejumlah kapal yang mengangkut pengungsi Tiongkok dan Vietnam dikembalikan ke tempat asal mereka setelah klaim suaka ditolak. Pemulangan yang cepat berarti banyak warga tidak sadar akan pengungsi. Selama periode ini, seorang pengungsi dari Indonesia ditahan selama 707 hari sebelum diberikan status pengungsi (McAdam, 2016).

Pada 1999, imigran Timur Tengah melarikan diri dari rezim opresif di Afghanistan, Iran dan Irak mulai berdatangan dalam jumlah besar. Pemerintah John Howard memperpanjang waktu yang mereka habiskan dalam tahanan wajib dan memperkenalkan visa perlindungan sementara untuk kedatangan kapal. Penangguhan tidak banyak menghentikan imigran; sekitar 12.000 pencari suaka mencapai Australia dari 1999 hingga 2001 (McAdam, 2016).

Kepentingan Nasional Australia dan Isu Pengungsi dan Pencari Suaka

Sebagai negara yang besar, kaya dan multikultural seperti Australia, perlakuan terhadap pencari suaka dan pengungsi adalah satu hal yang sering menjadi kontroversi. Isu mengenai pengungsi dan pencari suaka di Australia bukan tentang hak atau tanggung jawab, bantuan atau perlindungan, tetapi lebih tentang menghentikan perahu dari pengungsi dan menghancurkan bisnis penyelundupan manusia. Baik kedua partai politik besar terlibat dalam kompetisi membuat kebijakan yang menutup Australia sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang turun ke laut sebagai pengungsi ataupun pencari suaka.

Menurut Jane McAdam dalam tulisannya, “Australia and Asylum Seekers”, pencari suaka dan pengungsi di Australia adalah sasaran empuk untuk menciptakan kecemasan dan perasaan was-was di tingkat masyarakat, terutama berkaitan dengan keamanan nasional, isu pengangguran

dan komposisi demografi di masa mendatang. Pengungsi dan pencari suaka tidak dapat memilih dalam pemilu, sehingga suara mereka terpinggirkan dalam perdebatan politik, dan karena tempat penahanan mereka berada jauh di luar komunitas Australia, berada di pusat pemrosesan lepas pantai terpencil, perbedaan antara 'mereka' dan 'kita' semakin kuat. Para politisi telah memicu kekhawatiran bahwa pencari suaka menghadirkan ancaman tidak hanya terhadap integritas perbatasan Australia, tetapi juga pada keamanan nasional secara keseluruhan, dan beberapa dari media massa Australia, turut memperkuat sentimen negatif tersebut. Bahkan Tony Abbott dalam pertemuan di Sydney, sebagaimana dikutip dari The Sydney Morning Herald, mengatakan:

"Nope, nope, nope. We have a very clear refugee and humanitarian program. It's a refugee and humanitarian program which has been modestly expanded because we have stopped the boats and we are not going to do anything that will encourage people to get on boats. If we do the slightest thing to encourage people to get on the boats, this problem will get worse, not better. Australia will do absolutely nothing that gives any encouragement to anyone to think that they can get on a boat, that they can work with people smugglers to start a new life. If you want to start a new life, you come through the front door, not through the back door."

Kutipan tersebut memperkuat bagaimana kalangan politisi Australia, termasuk Perdana Menteri, telah menekankan posisi yang kontra terhadap menolong pengungsi dan pencari suaka yang masuk secara ilegal. Tony Abbott menekankan bahwa Australia telah memiliki program pencari suaka yang jelas, dan upaya memasuki Australia melalui cara ilegal sama sekali tidak ditoleransi oleh Australia.

Australia dan Konvensi Pengungsi Tahun 1951

Di saat yang sama, Australia sendiri merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi Tahun 1951, sehingga setiap individu yang oleh Konvensi dianggap sebagai pengungsi, memiliki hak untuk dilindungi oleh pemerintah. Australia menandatangani konvensi tersebut pada 22 Januari 1954, tetapi di saat yang sama menunjukkan ketidaksabarannya dengan status quo dan menginginkan adanya paradigma baru terkait pengungsi. Pemrosesan pengungsi dan pencari suaka lepas pantai seperti saat ini diberlakukan oleh Pemerintah Australia dianggap lebih melayani kepentingan nasionalnya daripada sistem perlindungan internasional saat ini; tetapi sistem tersebut melanggar Konvensi yang mana Australia adalah penandatangan (Smit, 2014).

Undang-undang Amandemen Legislasi Migrasi dan Pakta Kelautan 2014 milik Australia dengan sengaja menghapus sebagian besar referensi ke Konvensi 1951 dari Undang-Undang Migrasi 1958. Namun, dengan cara lain, Australia terus mematuhi Konvensi, secara langsung melalui program pengembalian kembali pengungsi, dan secara tidak langsung melalui prosesnya yang berkelanjutan. Pendekatan Pemerintah Australia saat ini mungkin bekerja dalam jangka pendek, tetapi tidak mungkin untuk mengurangi krisis suaka Australia dalam jangka panjang, dan itu merusak reputasi internasional Australia. Pemerintah perlu melihat melampaui kebijakannya saat ini dan memimpin debat internasional untuk mereformasi sistem perlindungan (Smit, 2014).

Peristiwa-peristiwa dalam kebijakan pengungsi Australia dalam beberapa dekade terakhir telah melihat perubahan pada cara kebijakan suaka negara dirasakan secara internasional. Untuk memahami ini, menjadi penting untuk melihat kewajiban Australia di bawah Konvensi 1951. Konvensi 1951 merupakan instrumen berbasis status dan hak dan berisi sejumlah prinsip dasar seperti prinsip non-pidana, non-refoulement dan non-diskriminasi. Menurut Maria Pedersen,

Australia secara umum melanggar prinsip non-hukuman dan non-refoulement, sebagai kebijakan Australia terhadap orang yang berusaha mencari suaka melalui kedatangan spontan dianggap melanggar dua bagian mendasar ini. Menurut Edwards, kualitas suaka dan kebijakan terhadap pencari suaka di Australia telah berubah secara dramatis hingga taraf tertentu, di mana sekarang dipertanyakan apakah Australia benar-benar menjunjung komitmen internasionalnya.

Prinsip non-hukuman ditemukan dalam Pasal 31 Konvensi 1951 bertujuan untuk melarang bahwa negara-negara penandatangan mengenakan hukuman bagi pencari suaka yang masuk tanpa paspor atau visa yang valid. Ketentuan-ketentuan Pasal 31 dibuat karena para penyusun mengakui bahwa para pengungsi yang sedang dalam penerbangan jarang berada dalam posisi, di mana mereka dapat memenuhi persyaratan untuk masuknya suatu negara secara hukum, seperti kepemilikan paspor dan visa nasional. Meskipun Pasal 31 menjelaskan bahwa manfaat imunitas dari hukuman karena masuknya secara ilegal meluas ke 'pengungsi', menurut Goodwin-Gil, sebagaimana dikomentari dalam sebuah makalah UNHCR, ketentuan itu akan tidak memiliki semua efek dan makna jika tidak juga termasuk pencari suaka, setidaknya sampai status mereka telah ditentukan.

Ketika melihat arti dari hukuman berjangka, dan apa yang mungkin membentuk, tidak jelas didefinisikan dalam Pasal 31, tetapi para penyusun tampaknya melihat penjara, denda dan kejaksaan dalam pikiran. Penahanan administratif diperbolehkan berdasarkan ayat 2, tetapi di sini ada perbedaan penting yang harus dibuat antara di satu sisi, penahanan yang dilakukan untuk tujuan penyelidikan status pencari suaka dan klaim, dan di sisi lain penahanan sebagai hukuman untuk entri ilegal, yang jelas dilarang di mana entri. Dengan kata lain, ditahan sewenang-wenang atas dasar mencari suaka dan tanpa tujuan yang jelas dan kerangka waktu jelas dilarang. Di sinilah kemudian Australia dianggap melanggar.

Operation Sovereign Borders dan Persepsi Pengungsi dan Pencari Suaka

Melalui Operation Sovereign Border ini, salah satu bentuk narasi utama yang diciptakan oleh Australia adalah bahwa siapapun yang masuk ke dalam Australia, terlepas dari siapa dan apa latar belakang mereka, adalah bagian dari ancaman nasional Australia.

Upaya penggambaran bahwa ancaman pengungsi dan pencari suaka nyata dapat dilihat dari penggunaan kata-kata "No Way, You Will Not Make Australia Home" dan "...introduced the toughest border protection measures ever.", yang menggambarkan bahwa tidak ada pengungsi dan pencari suaka yang akan masuk ke dalam Australia, dan mereka telah menyiapkan countermeasure yang keras untuk menghalau pengungsi dan pencari suaka ini dari upaya mereka untuk memasuki Australia.

Secara teoretik, wacana ancaman keamanan dalam tatanan internasional digambarkan sebagai sesuatu yang harus memiliki kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah bagaimana ancaman tersebut bisa bertransformasi menjadi ancaman yang bersifat eksistensial. Jadi ada perbedaan antara ancaman normal dan ancaman keamanan dan sejauh mana ancaman tersebut berdampak pada aspek eksistensi masyarakat adalah kriteria khusus yang memutuskan apakah ancaman adalah ancaman keamanan atau bukan. Oleh karena itu, untuk melegitimasi penggunaan kekerasan oleh negara untuk mengelola ancaman eksistensial, keamanan digunakan sebagai kunci untuk memobilisasi negara. Ini berarti bahwa keamanan memberikan kemampuan kepada negara-negara untuk membengkokkan batas dan aturan ketika menyangkut perlindungan terhadap negara mereka.

Analisis yang menarik juga disampaikan oleh Leicha Stewart dalam tulisannya yang berjudul "Sovereign Borders: The Militarisation of Asylum Seeker Discourses in Australian Television News Media", yang menganalisis iklan dan pemberitaan di Australia selama tahun 2013 ketika Operation Sovereign Borders berlangsung di awal tahun pertamanya. Analisis yang dimunculkan adalah bahwa sepanjang data dari iklan dan pemberitaan yang ada, penggunaan visual banyak dalam bentuk rekaman, dan bukan cuplikan aktual yang diambil secara langsung pada peristiwa / situasi yang dilaporkan.

Dan rekaman tersebut ditayangkan seiring dengan narasi lisan. Dalam kasus laporan berita tentang masalah imigrasi, gambar dan rekaman banyak menampilkan perahu yang membawa orang-orang yang mencari suaka dan kapal Angkatan Laut dalam proses melindungi perbatasan, menampilkan kesan bahwa pencari suaka sebagai ancaman sangat menonjol. Di 339 laporan berita, 337 gambar terpisah dari perahu suaka dan 542 gambar kapal Angkatan Laut Australia yang dianalisis Leicha Stewart, kehadiran kapal-kapal Angkatan Laut dan personel militer dalam laporan berita televisi adalah bukti kuat dari wacana militarisasi yang terkait dengan pencari suaka dan masalah imigrasi, mengingat argumen Daniel Wilson bahwa militerisasi sering melibatkan kehadiran personel militer yang sangat terlihat di perbatasan atau pengadopsian taktik militer secara terang-terangan.

Sementara Banks mengacu pada gambar-gambar ini sebagai gambar "wallpaper", gambar yang sebagian besar atau sepenuhnya berlebihan, dan CDA menganggap gambar-gambar ini bukan sebagai ilustrasi acak dari apa yang dikatakan wartawan, melainkan sebagai bingkai strategis tertentu dalam pemberitaan. Stewart mengamati bahwa penggunaan rekaman yang telah dibingkai ini dalam laporan berita televisi dapat menjadi indikasi dari persepsi Australia dalam melihat pengungsi dan pencari suaka secara ideologis, dan cenderung, melalui pengulangan rekaman saham tertentu, memperkuat stereotip kelompok minoritas baik sebagai 'mereka' dan sebagai entitas yang bermasalah (Banks, 2001).

Gabungan terbatas dari gambar-gambar dan potongan video dalam wujud kapal Angkatan Laut, perahu pencari suaka dan pengungsi, pencari suaka dan pengungsi dalam tahanan, dan adegan pusat penahanan, adalah contoh utama tentang bagaimana penayangan berulang dari satu diskursus yang sistematis dapat membangun dan memperkuat stereotip dan persepsi negatif bahwa pencari suaka dan pengungsi adalah bentuk ancaman. Ini juga menunjukkan bagaimana penggunaan media menjadi bagian upaya sekuritisasi Australia terkait isu pengungsi dan pencari suaka. Lebih dari itu, 62% dari 337 laporan berita yang dianalisis menampilkan setidaknya satu gambar dari Angkatan Laut atau perahu suaka, dengan kedua jenis gambar rata-rata menunjukkan representasi tiga per laporan. Gambar-gambar tersebut juga secara naratif disusun secara sistematis untuk memiliki implikasi dalam membangun pemahaman audiens tentang pengungsi dan pencari suaka.

Urutan naratif khas gambar yang ditemukan di seluruh data adalah sebagai berikut. Pertama, ada gambar kapal dalam kesusahan, kemudian sebuah kapal Angkatan Laut mendekat, mempersiapkan untuk melakukan 'penyelamatan', personel militer lalu kemudian menaiki perahu suaka, pencari suaka dibawa ke tahanan, kemudian dipindahkan ke tempat lain, tetapi umumnya narasi ini diakhiri dengan gambar orang-orang yang mencari suaka yang dipindahkan ke dan ditunjukkan di belakang pagar pusat penahanan.

Bagian akhir dari narasi ini mensimbolkan penghilangan dari sesuatu yang mewakili 'ancaman' bagi Australia. Dengan menutup narasi di adegan pemenjaraan pencari suaka, ini menghilangkan ruang bagi audiens untuk merefleksikan apa yang terjadi pada orang yang mencari suaka setelah mereka ditempatkan di pusat penahanan, untuk merefleksikan

pengalaman mereka sebagai orang dengan kehidupan dan keluarga, daripada dekriminasi target manusia.

Simpulan

Seperti yang telah dibahas di atas, Australia sebagai negara yang telah resmi meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 memiliki kewajiban penuh untuk menolong pengungsi dan pencari suaka yang nyawanya terancam, dan tidak boleh dikembalikan lagi ke negara asal ataupun ke kawasan luar negara tujuan mereka (non-refoulement). Tetapi faktanya, Australia memiliki seperangkat kebijakan tersendiri terkait dengan penanganan pengungsi dan pencari suaka, yang mana ternyata melanggar Konvensi Pengungsi 1951. Bentuk pelanggaran ini sendiri terlihat dari kebijakan Operation Sovereign Borders yang diberlakukan di masa administrasi Tony Abbott sebagai PM Australia. Kebijakan ini menekankan pelarangan pengungsi dan pencari suaka ilegal untuk masuk ke daratan Australia melalui jalur laut, dan sebaliknya pemerintah Australia memberlakukan dua opsi, yaitu mengembalikan mereka ke laut lepas atau memproses mereka ke pusat penahanan selama waktu yang mereka tentukan, dengan sedikit kemungkinan mereka bisa lolos untuk masuk sebagai pencari suaka.

Sebagai negara yang memiliki sejarah historis dan perseptif yang negatif dalam melihat orang-orang dari luar Australia, Australia telah lama membangun citra bahwa pengungsi dan pencari suaka merupakan entitas yang mengancam keamanan nasional Australia. Ini dibuktikan dari banyaknya kebijakan yang kontra pengungsi, pencari suaka, bahkan pendatang. Mulai dari White Australian Policy, Pacific Solution, hingga Operation Sovereign Borders yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, semua dibentuk dengan mempersepsikan pengungsi dan pencari suaka sebagai lawan dari Australia.

Daftar Pustaka

Buku

- Banks, M. *Visual Methods in Social Research*. London: Sage, 2001.
- Buzan, B. *etal. Identity, Migration, and the New Security Agenda in Europe*. London: Pinter, 1993.
- Buzan, B & Lene Hansen. *The Evolution of International Security Studies*. New York: Cambridge University Press. 2009
- Birrell, B. "Australia's Skilled Migration Program: Scarce Skills Not Required". *The Australian Population Research Institute*. Monash University (2016)
- Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. d. *Security: a new framework for analysis*. Boulder: Lynne Rienner. 1998
- Dunstan, R. *United Kingdom: Breaches of Article 31 of the 1951 Refugee Convention*. University of Iowa Press. 1998
- Foster, W, et al. *Immigration and Australia: Myths and Realities*. Sydney: Allen & Unwin. 1998
- Hugo Graeme. "Australian Immigration Policy: The Significance of the Events of September 11", *International Migration Review*, 36, No. 1. (2002)
- Jupp, J. *From White Australia to Woomera: The Story of Australian Immigration*. Sydney: Allen & Unwin. 2007
- Kneebone S. "The Pacific Plan: The Provision of Effective Protection" *International Journal of Refugee Law*. (2006)
- Kevin T. "A Certain Maritime Incident: The Sinking of SIE V X Senate Select Committee on a Certain Maritime Incident", Parliament of Australia, *Report on a Certain Maritime Incident* no. 2 (2004)
- Mearsheimer, J. "Back to the Future", *International Security* 15 no. 1 (1990)
- McAdam, J. dan K, Turcell. "Refugee protection in the Howard Years: Obstructing the Right to Seek Asylum" (2008)
- McAdam, J. Australia and Asylum Seekers, *International Journal of Refugee Law* 25, no.1 (2013)
- Nelson, S. "Does Compliance Matter? Assessing the Relationship Between Sovereign Risk and Compliance with International Law". *Review of International Organizations* 5 no. 2 (2010)
- Office of Parliamentary Counsel. *The Migration Act 1958*, Australia: Canberra. 2014
- Smit, J. H. *The Political Origins and Development of Australia's People Smuggling Legislation: Evil Smugglers or Extreme Rhetoric*. Edith Cowan University. 2014
- Stewart, L. "Sovereign Borders: The Militarisation Of Asylum Seeker Discourses In Australian Television News Media" *Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation* 1 no. 1 (2016)
- Wilson, D. "Border militarization, technology and crime control", dalam S. Pickering dan J. Ham (eds.), *The Routledge Handbook on Crime and International Migration*. New York: Routledge. 2014